

Strategi Wali Nagari dalam Implementasi Progam Pembangunan di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam

Maichel Firmansyah¹, Iddya Mustika², , Medina Medina³

^{1,3}Universitas Negeri Padang

²Universitas Terbuka

*Corresponding author, e-mail: firmansyahmaichel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Wali Nagari di Garagahan dalam mengimplementasikan program pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan aktif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling dengan kriteria informan penelitian yaitu yang memiliki pengetahuan yang baik terkait Wali Nagari dan programnya di Nagari Garagahan, Kabupaten Agam. Informan Penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Niniak Mamak, dan masyarakat. Hasil penelitian kinerja Wali Nagari sudah mendekati optimal pada perencanaan, tapi pada tahap pelaksanaan dan evaluasi masih kurang optimal. Kendala pada anggaran dan partisipatif masyarakat yang sulit karena faktor komunikasi interpersonal dan tidak aktifnya keterlibatan langsung Wali Nagari di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja; Garagahan; Wali Nagari.

Abstract

This study aims to analyze the performance of the Wali Nagari in Garagahan in implementing development programs. The research employs a qualitative method with a case study approach. The study was conducted from January to March 2025. Data collection techniques included active participant observation, structured interviews, and documentation. Informants were selected using purposive sampling, with the criteria being individuals who possess a good understanding of the Wali Nagari and its programs in Garagahan Nagari, Agam Regency. The study involved 10 informants, consisting of the Wali Nagari, traditional leaders (Niniak Mamak), and community members. The results show that the performance of the Wali Nagari is adequate in the planning phase. However, it remains limited in the implementation and evaluation stages. Challenges include budget constraints and low community participation, which are influenced by factors such as interpersonal communication issues and the lack of direct presence of the Wali Nagari within the community.

Keywords: Garagahan; Performance; Wali Nagari.

How to Cite: Firmansyah, M., Mustika, I. & Medina, M. (2025). Strategi Wali Nagari dalam Implementasi Progam Pembangunan di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *Jurnal Kajian Sosial Humaniora*, 2(2), 104-115.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki struktur kepemimpinan yang bersifat hirerki dari atas ke bawah, yaitu Pemerintahan pusat hingga daerah, yang secara spesifik diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang (Setiani, 2024). Unit pemerintahan terendah di Negara Indonesia adalah desa yang dipimpin oleh seorang pemimpin kepala desa.

Tugas dan fungsi dari kepala desa adalah untuk membantu pemerintah pusat mengurus rakyat dengan cakupan daerah yang telah diatur secara administratif di pemerintahan kabupaten/kota (Lindawaty, 2016). Di Sumatera Barat, unit pemerintahan terendah itu Nagari yang mengatur wilayah administratif di tingkat bawah, di mana Nagari berada satu tingkat di bawah Kecamatan. Dalam konstitusi Indonesia, yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah secara spesifik dibahas dalam Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 (Aristawati et al., 2024).

Penjelasan dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek dan locale rechtsgemensschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Nagari sebagai unit pemerintahan terendah juga memiliki arah tujuan pembangunannya berdasarkan kepada visi misi pemimpin (Laila, 2023). Maka visi-misi itu dapat terwujud apabila Wali Nagari menjalankan tugas dan fungsinya. Maka Kinerja Wali Nagari dalam mewujudkan implementasi pembangunan di Nagari menentukan tercapai atau tidaknya pembangunan yang ditargetkan. Penelitian tentang kinerja Wali Nagari dilakukan (Suryanto, 2019) bahwa terdapat sebuah pengaruh dari gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja di Kantor Wali Nagari.

Peran Wali Nagari sebagai pemimpin tertinggi di Nagari juga menjadi penompak bagi semua kebijakan dan pembangunan (Purnama & Luthfi, 2023).

Menurut Aini (2024) dalam pemerataan pembangunan infrastruktur ada peran kepemimpinan Wali Nagari dalam mewujudkan SDGs di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, hal itu meliputi pada keputusan, perencanaan pembangunan desa, pendataan desa untuk memprioritaskan program nasional, dan adaptasi kebiasaan baru melalui konsep "Desa Mandiri".

Penelitian lain juga ditemukan tentang pengawasan Bamus (badan musyawarah) di Nagari yang kurang dalam kinerja akibat dukungan anggaran dan administratif yang kurang memadai. Artinya, kinerja Wali Nagari dapat ditentukan dari dukungan anggaran dan administratifnya serta bagaimana dia menjalankan programnya, strategi apa yang dia lakukan dalam mengimplementasikan program pembangunan. Penelitian ini sama dengan penelitian (Suci & Syamsir, 2018) membahas soal kinerja aparatur nagari dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Salimpaung lebih dipengaruhi oleh kompensasi finansial dibandingkan dengan kompensasi non-finansial. Oleh karena itu, peningkatan kinerja aparatur dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek finansial sebagai prioritas dalam sistem kompensasi.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengungkap bahwa kinerja Wali Nagari sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dukungan administratif, dan kompensasi finansial. Misalnya, penelitian Suryanto (2019) menekankan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja aparatur nagari, sementara Suci & Syamsir (2018) menyoroti pentingnya kompensasi finansial dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan di nagari. Di sisi lain, Aini (2024) dan Purnama & Luthfi (2023) lebih menyoroti peran Wali Nagari dalam konteks pembangunan infrastruktur dan pencapaian SDGs.

Penelitian yang fokus pada kinerja Wali Nagari dalam menjalankan program pembangunan berdasarkan visi-misinya. Oleh karena itu, perlu rasanya mengkaji lebih mendalam soal kinerja Wali Nagari untuk mengetahui kinerja dan implementasi pembangunan di Nagari Garagahan. Maka penelitian ini fokus pada menganalisis kinerja Wali Nagari Garagahan dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan visi-misinya.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Wali Nagari di Garagahan dalam mengimplementasikan program pembangunan. Penelitian ini menggunakan

(Strategi Wali Nagari dalam...)

metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan pada bulan Januari hingga Maret 2025. Teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan aktif, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan dengan purposive sampling dengan kriteria informan penelitian yaitu yang memiliki pengetahuan yang baik terkait Wali Nagari dan programnya di Nagari Garagahan, Kabupaten Agam. Informan Penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Wali Nagari, Niniak Mamak, dan masyarakat. Teknik analisis data dengan menggunakan skema analisis Miles dan Huberman.

Hasil dan Pembahasan

Peran Wali Nagari dalam mengimplementasikan pembangunan di nagari berbarengan dengan komunikasi dan gaya kepemimpinan yang dipilihnya untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan program, maka dia juga dapat diukur berdasarkan kinerja Wali Nagari.

Nagari Garagahan

Garagahan merupakan salah satu nagari tertua yang terdapat dalam kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Menurut cerita yang diwariskan secara turun-temurun oleh para tetua dan nenek moyang di Nagari Garagahan, asal-usul nagari ini telah ada jauh sebelum terbentuknya nagari-nagari seperti Tikui, Pariaman, Sintuk, dan Lubuk Alung, yang diperkirakan bermula sekitar abad ke-13 Masehi. Hal itu diperoleh berdasarkan informasi dari M dt Bangso Dirajo, (57 Tahun)

"Leluhur pertama keluarga kami berasal dari Luak Tanah Datar, tepatnya dari Nagari Pariangan, Padang Panjang, yang dikenal sebagai salah satu daerah tertua dalam sejarah peradaban Minangkabau." (wawancara dilakukan pada 8 Februari 2025 di Nagari Garagahan).

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari M dt Siaga, S (55 Tahun) :

"Jumlah mereka ada dua belas orang, dan mereka datang bersama keluarga serta sanak saudara. Mereka pertama kali menetap di daerah dataran Ulak Gunung Tanjung Raya, yang kemudian dikenal dengan nama Simpang Sari Manis". (wawancara dilakukan pada 9 Februari 2025 di Nagari Garagahan).

Empat orang menuju wilayah sekitar Danau Maninjau, pertama, Nenek Rajo Endah, Nenek Rajo Dubalang, Nenek Tumbasa, Nenek Rangkayo Basa. Mereka menelusuri daerah sekitar danau yang kini dikenal sebagai Danau Maninjau, tiga orang

menuju Garagahan Padang Sialang: Nenek Tuan Pandak dari Suku Caniago, Nenek Patih Pahlawan dari Suku Tanjung, Nenek Majo Lelo dari Suku Piliang. Ketiga tokoh ini melintasi wilayah dari Gunung Memelintang ke arah barat hingga mencapai daerah pesisir yang kini mencakup wilayah Pasaman dan Topek Tapian Kandis.

Lima orang lainnya menuju wilayah Kota Bimo, arah Pasir Laut: Nenek Bandaharo, Nenek Tundaro, Nenek Sunaro, Nenek Mangkudun Sati, Nenek Lelo Bangso. Kelima leluhur ini menyusuri wilayah dari Gunung Tigo Hilir hingga ke daerah pesisir, yang sekarang termasuk dalam wilayah XII Koto di Kabupaten Padang Pariaman. Ke-12 leluhur tersebut pada masa itu dianggap sebagai pemimpin atau raja di daerah pesisir luar wilayah Luak Nan Tigo. Mereka dikenal dengan sebutan "Raja Dua Belas" di wilayah yang disebut sebagai "Nagari Rantau Nan Barajo".

Anak cucu dan kemenakan dari para leluhur ini kemudian berkembang dan menetap di berbagai daerah Nagari Rantau Nan Barajo, yang meliputi: Wilayah Hulu Danau, Muaro Tiku, Baramban XII Koto, dan Garagahan (Darmalion & Hasan, 2024).

Kinerja Wali Nagari dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan

Kinerja bersasal dari kata *job performance* atau *actual performance* yang berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Cardy (James dan Nelson, 2009: 195) mengatakan, *performance management is process of defining, measuring, appraising, providing feedback on, and improving performance*.

Dari pengertian ini dapat diuraikan bahwa mengelola kinerja sebaiknya dilakukan secara kolaboratif dan kooperatif antara pegawai, pemimpin, dan organisasi, melalui pemahaman dan penjelasan kinerja dalam suatu kerangka kerja atas tujuan-tujuan terencana, standar dan kompetensi yang disetujui bersama. Wali Nagari sebagai pemimpin regional pemerintahan terendah di Indonesia membutuhkan dorongan kinerja dalam melaksanakan program pembangunan di Nagari Garagahan. Perencanaan atas kegiatan atau program di suatu Nagari dilaksanakan sebagai wujud dari keseriusan Nagari, dengan adanya perencanaan yang matang maka akan jelas kemana arah pembangunan dan perkembangan suatu Nagari.

Wali Nagari Garagahan telah memimpin sejak tahun 2021-sekarang, di mana sudah banyak perencanaan yang dilakukannya. Hal itu juga berdasarkan pada wawancara dengan Dewi Warni, 34 Tahun :

(Strategi Wali Nagari dalam...)

“Wali Nagari ini sudah terpilih sejak tahun 2021, menjalankan perannya dengan sangat baik, karena setiap apa pun program akan disosialisasikan kepada masyarakat.” (wawancara dilakukan pada 5 Januari 2025 di Nagari Garagahan).

Sejak menjadi Wali Nagari Garagahan, beberapa program telah terlaksana secara sistematis oleh Wali Nagari, yaitu: “Nagari Madani”, “Rumah Tahfiz Nagari”, “Percontohan Negeri Adat”, “Melarang Hiburan malam orgen tunggal”, “Bantuan untuk Lansia”, “Pembangunan Kantor KAN”, “Balik ka surau”, “pembangunan irigasi”. Program-program yang telah berjalan sejak masa jabatan dari Wali Nagari Darmalion., S.Sos. Dilakukan dalam beberapa tahap untuk memaksimalkan program berjalan, hal itu diperoleh dari hasil informan Ade Irma Sartika tanggal 7 Januari di Nagari Garagahan).

Program pembangunan Wali Nagari dilaksanakan dengan terukur melalui prosedur koordinasi *top and down* oleh Wali Nagari. Sejak menjabat sebagai Wali Nagari Garagahan, pemangku kebijakan lokal ini telah menunjukkan kinerja yang signifikan melalui implementasi sejumlah program strategis yang berorientasi pada pembangunan berbasis nilai-nilai keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Berdasarkan wawancara dengan Ade Irma Sartika (28 Tahun):

“Program ini telah dilaksanakan oleh Wali Nagari dengan kerjasama bersama masyarakat yang punya keahlian pada bidang tersebut, sokongan masyarakat untuk program yang berbau fisik dan pendidikan cukup tinggi animonya” (wawancara dilakukan di Nagari Garagahan pada 12 Januari 2025).

Pada saat melaksanakan Program, Wali Nagari melakukan perencanaan dengan masyarakat lewat musyawarah Nagari yang dilakukan dalam dua kali sebulan. Hal itu didapat dari informan Darmalion, 37 Tahun :

“Saya melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk setiap program yang saya lakukan, karena perencanaan dengan mengundang masyarakat yang sesuai ahlinya untuk mendapatkan masukan karena yang mengerti kebutuhan dari program itu masyarakat sendiri, serta menjamin terrealisasikannya program itu ke depan” (wawancara dilakukan pada 18 Januari 2025 di Nagari Garagahan).

Perencanaan yang dilakukan oleh Wali Nagari Garagahan dengan mengambil jalan musyawarah adalah salah satu langkah yang strategis dan taktis untuk memperoleh

informasi atas kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat, karena dengan mengambil jalan musyawarah maka akan meminimalisir dari program yang tidak berjalan serta meredam konflik yang akan datang. Konflik dapat datang saat program yang dijalankan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, dan dianya dapat mengganggu dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di Nagari (Nanda et al., 2018).

Hal itu juga sejalan dengan temuan dari penelitian (Yeni & Malau, 2021) bahwa jalan musyawarah dapat menyelesaikan konflik akibat perencanaan dari pemerintah Nagari yang kurang tepat sasaran. Maka dengan musyawarah perencanaan untuk program yang hendak dilakukan dapat dijalankan berdasarkan aspirasi masyarakat. Perencanaan yang matang dengan persiapan yang baik telah terbukti dapat membuat program yang akan dijalankan jauh lebih efektif (Ramadhani et al., 2023). Hal ini yang telah dijalankan oleh Wali Nagari Garagahan pada proses pelaksanaan pembangunan Nagari.

Program Wali Nagari Garagahan terlaksana karena koordinasi ke masyarakat, akan tetapi komunikasi interpersonal yang dipilih oleh Wali Nagari tidak membawa pada efektif progam, karena dialog dengan masyarakat dibutuhkan agar program berjalan. hal itu berdasarkan informasi yang diperoleh dengan informan Syahrial, 43 Tahun:

“Masyarakat kurang aktif, saya sendiri juga tidak begitu ikut program yang ingin dijalankan pemerintah nagari, karena program itu tidak tanpa penjelasan kepada masyarakat, ditambah Wali Nagari sulit untuk hadir, hanya orang suruhan atau perangkat nagari yang berkomunikasi aktif dengan masyarakat” (wawancara dilakukan pada 4 Februari 2025 di Nagari Garagahan).

Pelaksanaan program yang dilakukan oleh Wali Nagari dengan tidak melaksanakan komunikasi yang kurang aktif kepada masyarakat akan membentuk pola penghambat bagi program-program yang dilaksanakan untuk masyarakat masyarakat. Kurang aktifnya komunikasi yang dibangun akan menjadi kausal terhadap iklim komunikasi yang tidak sehat, hal itu dapat menyebabkan program tidak bisa berjalan dengan maksimal (Purnomo, 2018). Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh secara optimal dari program yang telah direncanakan itu, masyarakat merasa bahwa program yang dijalankan tidak diperuntukan untuk mereka.

Wawancara dengan Roni Defarianto, 32 tahun :

“Wali Nagari terlalu membatasi diri dengan masyarakat, pada pelaksanaan sulit untuk berkomunikasi, komunikasi dengan Wali Nagari hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu saja, tentu masyarakat di sini jadi tidak mengerti apa program ini dan kemana, sekalipun sudah dimusyawarahkan di kantor Wali Nagari” (wawancara dilakukan pada 5 Maret 20225 di Nagari Garagahan)

Hal itu juga diperkuat oleh informan Mila Gustinofa, 33 tahun :

“Wali Nagari cenderung memberikan instruksi kepada perangkat dan pendamping nagari untuk menyampaikan informasi serta turun langsung ke masyarakat, sementara kehadiran Wali Nagari secara langsung pada kegiatan dan agenda tersebut tergolong jarang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 9 Februari 2025 di Nagari Garagahan)

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa Wali Nagari sudah menjalankan perannya pada perencanaan program dengan telah adanya beberapa program yang direncanakan akan dilaksanakan kepada masyarakat di Nagari Garagahan. Tapi, pada pelaksanaan kepada masyarakat wali Nagari tidak melakukan komunikasi yang efektif dan intens, sehingga program sulit untuk dirasakan oleh masyarakat seluruhnya. Hal itu juga dibuktikan dengan gaya kepemimpinan dari Wali Nagari yang cenderung menggunakan gaya kepemimpinan Semi-otoriter. Gaya kepemimpinan ini cocok digunakan pada masyarakat yang tergolong modern dan mampu mengurus

Kinerja Wali Nagari Garagahan dalam Implementasi Program Pembangunan Nagari

Indikator Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara yaitu:

Pertama, Kuantitas Kerja, standar ini dilakukan dengan cara membandingkan antara besarnya volume kerja yang seharusnya (standar kerja normal) dengan kemampuan sebenarnya.

Secara kuantitatif, keberadaan program-program tersebut mencerminkan tingginya produktivitas kerja yang diinisiasi oleh Wali Nagari Garagahan. Jumlah dan ragam kegiatan yang dijalankan menunjukkan bahwa volume kerja yang dilaksanakan telah memenuhi bahkan melampaui standar administratif yang lazim diterapkan di tingkat pemerintahan Nagari.

Secara kualitatif, pelaksanaan program mengedepankan nilai-nilai religius, partisipatif, serta berdampak langsung pada pembangunan karakter masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kerja Wali Nagari tidak hanya terfokus pada output administratif, tetapi juga pada outcome sosial yang berkelanjutan.

Wawancara dengan Mila Gustinofa (33 tahun)

“Wali Nagari cukup cekatan untuk merealisasikan program-program yang difungsikan untuk pembangunan Nagari” (wawancara dilakukan pada 15 April 2025 di Nagari Garagahan).

Kedua, Kualitas Kerja, standar ini menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan dibandingkan volume kerja. Pemanfaatan Waktu, yang penggunaan masa kerja disesuaikan dengan kebijaksanaan perusahaan.

Keberhasilan dalam menyelenggarakan berbagai program tersebut tidak terlepas dari efektivitas pemanfaatan waktu kerja. Pengelolaan waktu yang efisien tercermin dari terselenggaranya kegiatan secara terstruktur, terjadwal, dan tepat sasaran. Wali Nagari Garagahan mampu mengatur prioritas kerja, melakukan koordinasi lintas sektor, serta memastikan kesinambungan antara perencanaan dan implementasi program.

Wawancara dengan Ade Irma Satika (35 tahun):

“Wali Nagari telah menyusun semuanya dengan perencanaan yang matang, sebelum program dijalankan ada beberapa kali pertemuan untuk membahas program” (wawancara dilakukan pada 7 Maret 2025 di Nagari Garagahan)

Prioritas kerja dari wali nagari itu terlihat dari memilih program yang di rasa mendesak dan program yang tidak terlalu mendesak, berkat prioritas kerja itu akhirnya program-program sukses terbentuk karena kinerja wali nagari yang memprioritaskan program lebih dibutuhkan. Program-program yang direncanakan terlaksana bahkan lebih cepat dari waktu yang ditargetkan, hal itu karena perencanaan yang dilakukan dimusyawarahkan secara berkesinambungan dari unsur Wali Nagari dan masyarakat. Hal itu diperoleh juga dari hasil wawancara dengan Zamrizal Efendi (44 tahun) :

“program ini cepat terrealisasikan, baru selesai musyawarah Nagari, tidak butuh waktu lama, program nampak sudah dijalankan secara bertahap”

Keberhasilan program ini disebutkan oleh perencanaan yang matang, ditambah kinerja dari Wali Nagari yang memprioritaskan program yang mendesak. Ikut sertanya masyarakat dalam musyawarah Nagari dan memprioritaskan kepentingan masyarakat serta program yang mendesak jadi suatu strategi yang bagus untuk pembangunan Nagari, Kinerja Wali Nagari yang memberikan penilaian prioritas kerja jadi sumbangsih pembangunan Nagari (Sofia et al., 2023). Hal ini sejalan dengan pendapat (Amani et al., 2023) bahwa perencanaan yang matang akan menjadikan program yang direncanakan berjalan menjadi berkualitas, berhasilnya Wali Nagari pada merencanakan program

pembangunan di Nagari Garagahan meunjukkan kinerja yang tinggi dari Wali Nagari Garagahan.

Keempat, Tingkat Kehadiran, asumsi yang digunakan dalam standar ini adalah jika kehadiran pegawai di bawah standar kerja ditetapkan maka pegawai tersebut tidak akan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi perusahaan.

Pada tingkat kehadiran, Wali Nagari masih mengalami kesulitan, kinerja itu tidak dapat dirasakan karena komunikasi yang terbat oleh Wali Nagari. Wawancara dengan Syahril (43 tahun):

“Tingkat kehadiran Wali Nagari dalam kegiatan atau kepada masyarakat terbatas, masyarakat sulit menyampaikan aspirasinya langsung”.
(Wawancara dilakukan pada 17 Februari 2025 di Nagari Garagahan).

Tidak hadirnya Wali Nagari dalam mengimplementasikan program pembangunan di Nagari menjadi kausalitas dari tidak begitu partisipatifnya masyarakat, karena masyarakat tidak bertemu langsung dengan Wali Nagari yang menambah semangat dari masyarakat. Hadirnya pemimpin secara langsung akan memberikan teladan dan mendorong dari semangat bagi masyarakat (Marliani & Djadjuli, 2019).

Ketidakhadiran dari Wali Nagari ini yang akan membawa masyarakat tidak begitu antusias mengikuti program karena tidak hadirnya sosok yang dianggap penting di tengah-tengah masyarakat, perlu adanya kehadiran pemimpin untuk menciptakan semangat dari masyarakat, mendorong adanya kepedulian pemimpin terhadap rakyatnya.

Kelima, Kerjasama, keterlibatan seluruh pegawai dalam mencapai target yang ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan bagian yang diawasi. Kerjasama antara pegawai dapat ditingkatkan apabila pimpinan mampu memotivasi pegawai dengan baik. Wali Nagari Garagahan telah membangun hubungan kerja sama yang baik terhadap lembaga, masyarakat dan unsur terkait untuk membangun Nagari.

“Wali Nagari membangun kerja sama yang baik dengan perangkat nagari, lembaga adat, dan masyarakat dan dinas”. (Wawancara dilakukan pada 8 April 2025)

Kerjasama itu diperlukan karena menjadikan program lebih terencana, terlaksana dan dapat dievaluasi (Suryanto, 2019). Keberhasilan membangun kerjasama Wali Nagari dengan berbagai sektor dan lembaga menjadi suksesi pada pelaksanaan program pembangunan di nagari Garagahan. Berkat kerjasama lembaga akhirnya membawa Nagari Garagahan pada pembangunan yang pesat dalam fisik dan non fisik.

Kesimpulan

Kinerja Wali Nagari Garagahan menunjukkan keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Namun, komunikasi yang kurang aktif dan kehadiran Wali Nagari di lapangan yang terbatas menghambat partisipasi masyarakat secara optimal. Kerjasama dengan perangkat nagari dan lembaga terkait sudah terjalin baik, mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu peningkatan komunikasi dan keterlibatan langsung Wali Nagari dengan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Aini, N. (2024). *Kewenangan Wali Nagari Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Nagari Koto Sawah Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat*. Universitas Malikussaleh.
- Amani, S., Muhafidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur (Nagari Guguk Tabek Sarjo, Kecamatan Iv Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *Jane-Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 632–640. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45119>
- Aristawati, K. N., Fahmi, M. T., Fadeli, M. R., & Wardani, N. K. (2024). *Aspek Hukum Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*. 01(1).
- Darmalion, D., & Hasan, A. (2024). Peranan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus) Dalam Pengawasan Pemerintahan Nagari Di Nagari Garagahan Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam. *Jurnal Mirai Management*, 9(1), 1095–1108. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i1.7318>
- Laila, Y. (2023). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari Dalam Pembangunan Jalan Oleh Wali Nagari Tanjung Binkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Ditinjau Dari Fiqh Siyasah*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lindawaty, D. S. (2016). Dukungan Pemerintah Terhadap Otonomi Desa: Perbandingan Indonesia Dan Cina. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 3(2). 10.22212/jp.v3i2.318
- Marliani, L., & Djadjuli, R. D. (2019). Menakar Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara Di Era Globalisasi. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(2), 74–80. <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v10i2.1654>
- Nanda, L. D., Tan, F., & Noer, M. (2018). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyelamatan Dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Danau

- Maninjau. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 105–115. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v8i2.7432>
- Purnama, T. E., & Luthfi, Z. F. (2023). Tantangan Kepemimpinan Perempuan Minangkabau Di Nagari/Desa Sijunjung, Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Studi Gender & Anak Tantangan*, 10(2).
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 11–26.
- Ramadhani, R. D., Hikmaturokhman, A., Bahtiar, A. R., Nugraha, N. A. S., Muna, B. L., & Raharja, P. A. (2023). Penguatan Kapasitas Peran Aktif Perempuan Melalui Program Wanita Melek Perencanaan Desa (Wani Lemper) Berbasis Teknologi Informasi Di Desa Logede, Kabupaten Kebumen. *Jurnal Hilirisasi Technology Kepada Masyarakat (Sitechmas)*, 4(2), 96–105.
- Setiani, I. (2024). Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.59818/Jps.V3i1.655>
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Nagari Aia Manggih Periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal Of Economics And Business*, 7(2), 1172–1181.
- Suci, R., & Syamsir, S. (2018). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Perangkat Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari Di Kecamatan Salimpaung. *Jess (Journal Of Education On Social Science)*, 2(1), 47–58.
- Suryanto, D. (2019). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Wali Nagari Koto Tinggi Kecamatan Baso Kabupaten Agam. *Jusie (Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi)*, 3(02), 102–114.
- Yeni, N. A. A., & Malau, H. (2021). Koordinasi Pengawasan Badan Permusyawaratan Nagari Dengan Wali Nagari Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Muara Sakai. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 203–214.